

Kebijakan Tata Ruang di Kota Bandung Pada Masa Pemerintahan Ridwan Kamil (2013-2018) : Studi Kasus Konflik Proyek Pembangunan Rumah Deret Tamansari = Urban Policy in Bandung during Ridwan Kamil Government (2013-2018): Study Conflict of Tamansari Housing Construction.

Ramadyani Febi L, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920533021&lokasi=lokal>

Abstrak

Konflik lahan merupakan salah satu hal yang sering terjadi pada kebijakan pembangunan perkotaan. Atas hal itulah skripsi ini mengangkat tema kebijakan politik kota dan kaitannya dengan urban regime dan partisipasi warga. Skripsi ini melihat konflik lahan yang terjadi dalam kebijakan pembangunan Rumah Deret Tamansari pada masa pemerintahan Ridwan Kamil periode 2013-2018. teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori urban regime dan konsep citizen participation. Temuan dari penelitian ini adalah kebijakan politik kota, pembangunan rumah deret Tamansari sebagai akar dari konflik lahan antara pemerintah kota Bandung dengan warga RW 11 Tamansari. Ketidakterbukaan pemerintah ktoa Bandung terhadap kebijakan ini menjadi dorongan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan melalui resistensi untuk menjadi “partner” yang setara dengan Pemerintah Kota Bandung. Sehingga dapat melihat tipe urban regime yang terjadi di kota Bandung.

.....Land conflict is one of the things that often happens in urban development. This thesis raises the theme of urban politics and its relation to urban regimes and citizen participation. This thesis studies land conflicts that have occurred in the policy of building Tamansari’s Housing Constructions in the period of Ridwan Kamil (2013- 2018). The theory used in this study is the urban regime theory and the concept of citizen participation. The findings of this study are the city's political policy, the construction of Tamansari’s housing as the root of land conflicts between the Bandung city government and residents of Tamansari. The lack of openness of the Bandung government become an encouragement for citizens to participate in policy making through resistance to become a "partner" that is equivalent to the Bandung City Government. So we can identify the type of urban regime that occurred in Bandung.